

Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Budaya Politik Generasi Milenial Pasca Pemilu 2024 di Desa Bandar Klippa

Gabriella Stepani¹, Samuel Pratama Depari², Nisa Andriani Regar³, Fatiya Nur Rahma⁴, Putri Andini⁵, Julia Ivanna⁶, Irhas Jaya⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: gabriellastepani@gmail.com¹, samueldepari202@gmail.com²,
nisa.andriani2003@gmail.com³, fatiyanurrahma100803@gmail.com⁴,
putriandini040703@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Bandar Klippa dalam membangun budaya politik generasi milenial pasca Pemilihan Umum 2024. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bandar Klippa mengadopsi berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi milenial, seperti penyelenggaraan forum diskusi, pelatihan sosialisasi, dan pemanfaatan media sosial. Forum diskusi rutin diadakan untuk membahas isu-isu politik lokal, sementara pelatihan sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai proses pemilihan dan peran serta hak politik. Media sosial digunakan sebagai alat utama untuk menjangkau dan mengedukasi generasi milenial tentang pentingnya partisipasi politik. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan hambatan signifikan, seperti rendahnya pemahaman politik lokal di kalangan generasi milenial dan kurangnya keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan politik. Kurangnya edukasi politik sejak dini dan dominasi informasi politik nasional dibandingkan dengan isu-isu lokal turut berkontribusi pada hambatan ini. Kesimpulannya, meskipun upaya pemerintah desa sudah signifikan, dibutuhkan perhatian lebih lanjut dalam edukasi dan keterlibatan generasi milenial untuk menciptakan budaya politik yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat lokal.

Kata kunci: *Pemerintah Desa Bandar Klippa, Budaya Politik, Generasi Milenial*

Abstract

This research aims to analyze the role of the Bandar Klippa Village Government in building the political culture of the millennial generation after the 2024 General Election. The research methods used include observation, in-depth interviews and document analysis. The research results show that the Bandar Klippa Village Government adopted various strategies to increase the political participation of the millennial generation, such as holding discussion forums, socialization training, and using social media. Regular discussion forums are held to discuss local political issues, while outreach training focuses on increasing understanding of the electoral process and political roles and rights. Social media is used as the main tool to reach and educate the millennial generation about the importance of political participation. However, this research also found significant obstacles, such as the low understanding of local politics among the millennial generation and their lack of active involvement in political activities. A lack of political education from an early age and the dominance of national political information compared to local issues also contribute to this challenge. In conclusion, although the village government's efforts have been significant, further attention is needed in the education and involvement of the millennial generation to create a more inclusive and participatory political culture at the local level.

Keywords : *Bandar Klippa Village Government, Political Culture, Millennial Generation*

PENDAHULUAN

Budaya politik Indonesia merupakan realitas mendasar dan paling kuat dalam sistem politik. Budaya politik sendiri adalah kehidupan berbangsa, penyelenggaraan pemerintahan nasional, kebijakan nasional, hukum, adat istiadat, dan pola tingkah laku manusia yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat dan dialami sehari-hari. Perbedaan karakteristik budaya pemilih terlihat pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) (Fauzi, 2023). Budaya politik milenial saat ini sangat erat kaitannya dengan internet dan media sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, baik masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas maupun kelas bawah. Besarnya jumlah pengguna internet dan media sosial dapat menggantikan media tradisional dan media sosial yang berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan warga. Bagi peserta pemilihan umum 2024, pemilih milenial dapat dijadikan basis pemilih. Dengan memahami karakteristik budaya pemilih milenial, proses sosialisasi pencalonan sekaligus promosi para calon dapat dilakukan dengan baik. Terlebih lagi hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap seorang calon. Pemilu adalah momen penting bagi negara demokrasi. Media massa berperan penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat, khususnya generasi milenial. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif untuk memastikan dukungan terhadap pemilu 2024 tetap adil dan demokratis (Munadi, 2023).

Dalam membangun dan mengembangkan kesadaran politik harus dimulai dari generasi muda. Mengembangkan pemahaman mendasar dan komprehensif mengenai arah politik dalam pembangunan demokrasi di Indonesia yang merupakan sebuah tantangan yang sulit. Indonesia merupakan negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah penerapan sistem ketatanegaraan. Indonesia menyelenggarakan pemilu demokratis pertamanya pada tahun 1995. Sebelum itu, masa Orde Baru berlanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Selain itu, tiga pemilu diadakan selama masa reformasi: pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Seiring berjalannya pemilu tersebut, istilah pemilu, rakyat Indonesia kemudian mengenal dengan nama hak politik rakyat Indonesia (Rohim & Wardana, 2019). Salah satu bagian utama di dalam hubungan komunikasi politik dengan partisipasi politik generasi milenial adalah peran media sosial. Generasi milenial merupakan generasi yang cenderung memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dan lainnya untuk mendapatkan informasi terkait isu-isu yang mereka anggap penting. Maka dari itu pemanfaatan media social sebagai saluran komunikasi politik dapat merangsang minat dan partisipasi generasi milenial itu sendiri. Generasi muda yang tergolong generasi milenial merupakan kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Yang membuat generasi milenial istimewa adalah budaya dan minatnya yang tinggi terhadap teknologi informasi. Namun, generasi milenial kurang tertarik pada politik atau hal lainnya. Kurangnya minat terhadap politik menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki literasi politik yang rendah.

Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran generasi muda terhadap pola politik Indonesia saat ini. Permasalahan umum yang terjadi antara lain kepemimpinan partai yang buruk, meningkatnya korupsi yang dilakukan oleh elit politik, dan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap politik, pesan-pesan politik di media sosial perlu diseleksi secara cermat sesuai dengan minatnya. Dengan kata lain, media sosial seharusnya dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Pesan-pesan politik, baik tertulis maupun tidak tertulis, verbal atau nonverbal, terselubung atau terang-terangan, disadari atau tidak, mengandung unsur politik sehingga membantu merekonstruksi pemikiran politik seseorang dalam menemukan pola politik yang baik baik (Boinaw et al., 2023). Tulisan ini fokus pada peran pemerintah terhadap budaya politik pada generasi milenial, pemerintah harus berperan aktif dalam budaya politik pada generasi milenial saat ini, politik tidak hanya di dapat dari media social akan tetapi politik juga harus di dapat di pemerintah desa, karena pemerintah desa ikut andil dalam masalah seperti ini, contohnya ikut serta dalam KPPS untuk pemilihan yang akan datang. Ada pun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam membangun budaya politik generasi milenial di Desa Bandar Klippa pasca pemilu 2024. lalu untuk mengetahui Apa tantangan yang di hadapi pemerintah desa dalam membangun budaya politik generasi milenial di Desa Bandar Klippa pasca Pemilu 2024. dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana respon

generasi milenial di Desa Bandar Klippa terhadap Upaya yang di lakukan oleh pemerintah desa dalam membangun budaya politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam membangun budaya politik generasi milenial di Desa Bandar Klippa pasca Pemilu 2024, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya tersebut, serta mengevaluasi respon generasi milenial terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memperkuat budaya politik di kalangan mereka. Pentingnya penelitian ini di lakukan ialah, untuk melihat pemahaman generasi milenial mengenai budaya politik, peran pemerintah daerah terkait budaya politik pada generasi milenial pasca pemilu 2024.

Nilai kebaruan yang ada pada penelitian ini ialah, penelitian ini lebih mengacu pada Peran Pemerintah desa dalam membangun budaya politik generasi milenial pasca pemilu 2024 di desa bandar klippa, dapat di lihat dari penelitian sebelumnya lebih mengacu pada budaya politik generasi milenial tanpa ikut andilnya pemerintah di dalamnya itu sebabnya penelitian kami berbeda dengan peneliti sebelumnya, untuk lokasi penelitian sering di gunakan sebagai tempat penelitian akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian kami, contohnya penelitian sebelumnya di desa bandar klippa lebih mengacu pada program-program desa seperti program PKK yang di ikuti oleh ibu-ibu PKK, tanpa andilnya pemerintah desa ketika melakukan penelitian. Dengan penelitian ini harus ikut andilnya pemerintah desa terhadap budaya politik pada generasi milenial saat ini .

METODE

Dalam penelitian mengenai perkembangan politik lokal di Indonesia, metode kepustakaan menjadi pendekatan yang sangat relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika politik lokal. Penelitian ini memanfaatkan literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan politik di Indonesia. Salah satu aspek penting yang dapat dieksplorasi melalui metode kepustakaan adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian oleh Iskandar dan Ahmad Iskandar & Ahmad (2020) menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan momen demokratis yang penting, di mana masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam memilih pemimpin daerah.

Hal ini sejalan dengan temuan Yonda dan Pierewan (Yonda & Pierewan, 2019), yang menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum. Kepercayaan ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menciptakan legitimasi bagi pemimpin terpilih. Di sisi lain, Fadillah et al. Fadillah et al. (2019) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya big data, telah mulai mempengaruhi strategi kampanye politik di Indonesia. Dengan memanfaatkan data besar, partai politik dapat lebih memahami preferensi pemilih dan merancang kampanye yang lebih efektif. Ini menunjukkan bahwa metode kepustakaan tidak hanya terbatas pada analisis teks, tetapi juga dapat mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi politik lokal. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat mengkaji bagaimana partai politik berfungsi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Sembiring et al. Sembiring et al. (2018) menjelaskan bahwa partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, serta berfungsi untuk mengontrol kekuasaan.

Dengan menggunakan metode kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai model rekrutmen partai politik serta dampaknya terhadap dinamika politik lokal. Dalam rangka memperkuat analisis, metode kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi literatur yang membahas tentang perubahan sosial dan politik di Indonesia, termasuk peran perempuan dalam politik, seperti yang dibahas oleh Iskandar dan Ahmad (Iskandar & Ahmad, 2020). Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam struktur sosial mempengaruhi partisipasi politik dan kebijakan lokal. Secara keseluruhan, metode kepustakaan menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk memahami perkembangan politik lokal di Indonesia. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber dan perspektif, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika politik di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Membangun Budaya Politik Generasi Milenial Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Budaya Politik Generasi Milenial adalah krusial dalam menggalang partisipasi aktif dan keterlibatan generasi muda dalam proses politik lokal. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong generasi milenial untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan inklusif, menyelenggarakan program-program pendidikan politik, dan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah desa dapat membantu membentuk budaya politik yang responsif, transparan, dan partisipatif bagi generasi milenial. Dalam menciptakan kemakmuran di desa, dibutuhkan generasi penerus yang memiliki pemikiran yang luas, seperti yang dimiliki oleh generasi milenial yang sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu wilayah masyarakat.

Selain kontribusi dari generasi milenial, peran pemerintah desa juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dapat dianggap sebagai upaya untuk menggabungkan usaha-usaha masyarakat desa dengan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Putri Adeana et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bandar Klippa memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun budaya politik generasi milenial pasca Pemilu 2024. Melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan, pemerintah desa berusaha untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan umum. Sosialisasi ini melibatkan penyampaian informasi tentang pentingnya pemilu dan cara-cara berpartisipasi secara aktif, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, terutama terkait dengan kurangnya minat dan kesadaran politik di kalangan generasi milenial. Generasi muda cenderung lebih fokus pada kegiatan lain dan merasa bahwa politik tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan relevan untuk menarik minat generasi milenial terhadap politik. Pemerintah desa telah melibatkan perwakilan generasi milenial dalam berbagai kegiatan, seperti musyawarah desa dan sosialisasi mengenai pemilu. Ini merupakan langkah positif dalam upaya membangun budaya politik yang inklusif. Selain itu, pemuda di Desa Bandar Klippa secara rutin mengadakan sosialisasi untuk mendiskusikan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik pasca pemilu 2024. Sosialisasi mengenai pemilihan umum dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat partisipasi serta jumlah pemilih dalam pemilu 2024. Lebih dari itu, ini juga dapat memupuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk dalam menggunakan hak-hak mereka dalam proses pemungutan suara yang dilakukan secara independen, logis, dan bertanggung jawab (Abunawas, 2023). Namun, inisiatif ini tampaknya belum cukup untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan pembangunan budaya politik, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang golput saat pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya berhasil dalam menjangkau dan mengubah sikap semua warga. Sebagian besar masyarakat, termasuk generasi milenial, masih menunjukkan ketidakpedulian terhadap proses politik.

Dalam pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam membangun budaya politik generasi milenial di Desa Bandar Klippa masih perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya lebih lanjut dan pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif generasi milenial dalam kegiatan politik. Langkah-langkah ini dapat mencakup program pendidikan politik yang lebih terfokus, kegiatan yang lebih menarik bagi generasi milenial, serta strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan meningkatkan peran serta dan partisipasi generasi milenial dalam politik, diharapkan mereka dapat menjadi bagian yang lebih aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah desa dalam mendorong perubahan ini dan menyarankan agar pemerintah desa mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan relevan untuk menarik minat dan partisipasi generasi milenial dalam politik. Tantangan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Banda Klippa Dalam Membangun Budaya Politik Generasi Milenial Generasi milenial umumnya

didefinisikan sebagai individu yang lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Mereka tumbuh di tengah perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat, yang memberikan pengaruh besar terhadap pandangan dan nilai-nilai mereka. Generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang terhubung secara digital, dengan akses yang luas terhadap internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Kemampuan teknologi ini memainkan peran besar dalam membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia, termasuk keterlibatan mereka dalam politik. Generasi milenial, yang merupakan kelompok demografis yang besar dan berpengaruh, membawa harapan dan tantangan baru dalam arena politik. Sebagai kelompok yang tumbuh di era digital dengan akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi, generasi milenial memiliki potensi besar untuk membentuk arah politik suatu negara.

Namun, pada saat yang sama, mereka juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka. Budaya politik generasi milenial ini juga merupakan seperangkat nilai, sikap, dan orientasi yang dimiliki oleh individu-individu yang lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an atau awal 2000-an terhadap sistem politik dan proses politik (Muhammad Nuruzzaman et al., 2020). Pada budaya politik generasi milenial ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, yang memainkan peran sentral dalam cara generasi milenial mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan terlibat dalam aktivitas politik. Budaya politik milenial saat ini tidak terlepas dari internet dan media sosial, yang tidak terpisahkan dari besar kehidupan masyarakat Indonesia baik warga kelas ekonomi menengah ke atas dan generasi muda. Massifnya pengguna internet dan media sosial mampu menggeser media konvensional maupun wadah sosial yang selama ini memiliki peran pokok dalam menyebarkan pengetahuan warga (A.Rahman Wempie & Akmaluddin, 2024). Generasi milenial ini menganggap bahwa teknologi merupakan gaya hidup yang tidak dapat terpisahkan. Akibatnya, mayoritas generasi menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupannya seperti mencari-cari informasi melalui internet. Generasi milenial akan lebih tertarik dengan informasi yang didapatkan melalui internet atau media sosial dibandingkan koran atau majalah. Akan tetapi, teknologi juga mengakibatkan generasi milenial memiliki gaya hidup yang konsumtif. Sehingga, generasi milenial sangat senang melakukan transaksi online dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari perbedaan karakteristik setiap generasi. Karakteristik dapat berupa sifat, cara pandang, dan pola pikir yang berbeda dalam kehidupannya untuk menjalankan suatu aktivitas (Irwan et al., 2021).

Generasi milenial dengan akses yang luas terhadap teknologi informasi dan komunikasi, memiliki potensi besar untuk membentuk arah politik suatu negara karena mereka dapat dengan mudah berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan mengorganisir aksi politik melalui platform digital. Namun, tantangan seperti ketidakpercayaan terhadap institusi politik tradisional, kesulitan ekonomi, dan overload informasi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka (Fauzi, 2023). Maka melihat dari tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam membangun budaya politik generasi milenial, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya minat terhadap politik yang sering kali diikuti oleh apatisisme dan ketidakpercayaan. Selain itu, rendahnya pendidikan politik, akses terbatas terhadap informasi, pengaruh media sosial yang besar, serta budaya politik yang belum terbentuk dengan baik juga menjadi hambatan. Tidak hanya itu, kurangnya ruang untuk partisipasi, tekanan sosial dan kultural, infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya dukungan dari kepemimpinan lokal juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun budaya politik yang lebih kuat di kalangan generasi milenial. Maka berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Pak Kepala Desa di Bandar Klippa ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan salah satu tantangan utama dalam membangun budaya politik generasi milenial pasca Pemilu 2024 ini adalah adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, tingkat apatisisme politik di kalangan generasi milenial dan pengaruh media sosial dan informasi hoaks. Dalam hal ini, dia menyatakan bahwa desa dibandar klippa masih menghadapi tantangan dalam hal akses ke informasi dan teknologi, serta kekurangan dana untuk membangun program-program yang dapat mendorong generasi milenial untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Setelah Pemilu 2024, pemerintah desa menghadapi tantangan utama dalam membangun budaya politik generasi milenial karena kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Menurut Pak Kepala Desa Bandar

Klippa, hal ini menghambat upaya mereka untuk memberikan pendidikan politik yang memadai dan membuat generasi milenial mudah terlibat dalam proses politik lokal.

Selain kekurangan sumber daya dan infrastruktur, Pak Kepala Desa juga menekankan masalah tambahan, seperti kurangnya kesadaran politik generasi milenial, kurangnya partisipasi aktif dalam politik, dan sulit untuk membuat generasi milenial terlibat secara berkelanjutan dalam pembangunan desa. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa tingkat apatisme politik di kalangan generasi milenial juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam membangun budaya politik pasca Pemilu 2024. Beliau ini mengungkapkan semakin banyak generasi milenial yang merasa tidak tertarik atau apatis terhadap politik, hal ini menghambat upaya pemerintah desa untuk mengajak mereka terlibat dalam proses politik lokal dan membangun kesadaran politik yang kuat di tingkat desa. Pak Kepala Desa juga menyoroti bahwa tingkat apatisme politik di kalangan generasi milenial menciptakan tantangan dalam menciptakan pemahaman yang baik tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Beliau menyebutkan bahwa upaya untuk mengatasi apatisme politik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penyediaan pendidikan politik yang menarik dan relevan bagi generasi milenial, serta membangun saluran komunikasi yang efektif untuk mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Selain itu, Pak Kepala Desa juga menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan generasi milenial melalui penggunaan teknologi dan media sosial. Beliau mengakui bahwa generasi milenial cenderung lebih aktif di platform online, oleh karena itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan media sosial dan teknologi komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi tentang proses politik, menggalang dukungan, dan memobilisasi partisipasi politik generasi milenial. Ini merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi apatisme politik dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi milenial pasca Pemilu 2024. Selanjutnya beliau ini mengatakan bahwa desa bandar klippa juga menghadapi kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan hoaks, serta dalam mengajak generasi milenial untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang lebih positif dan berdampak. Pak Kepala Desa Bandar Klippa menekankan perlunya upaya edukasi intensif kepada generasi milenial tentang pentingnya memahami sumber informasi yang akurat dan kritis. Beliau juga mencatat pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun kesadaran politik yang sehat di kalangan generasi muda.

Selain itu, beliau juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan budaya politik yang positif di kalangan generasi milenial. Dari hasil wawancara diatas kenyataan dari tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam membangun budaya politik di kalangan generasi milenial di Desa Bandar Klippa ini adalah kurangnya masih pemahaman dan kesadaran politik, serta rendahnya minat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, yang tercermin dalam tingginya tingkat golput pada pemilu 2024. Meskipun sudah dilakukan berbagai program dan sosialisasi, namun efektivitasnya masih kurang dalam menarik minat dan partisipasi generasi milenial. Diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan komprehensif untuk mengatasi tantangan ini, mungkin dengan melibatkan generasi milenial secara lebih langsung dan memperkuat pendidikan politik di masyarakat, Selain itu, pemerintah desa harus memanfaatkan media sosial dan teknologi yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari generasi milenial agar informasi politik dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi mereka. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan tokoh muda yang berpengaruh di komunitas dapat membantu generasi milenial lebih terlibat dalam politik.

Cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan minat generasi muda adalah dengan mengadakan acara yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, debat publik, dan simulasi pemilu. Respon Generasi Milenial Terhadap Peran Pemerintah Desa Membangun Budaya Politik Budaya politik sebagai suatu sikap terarah khas masyarakat suatu negara bermula dari akar budaya politik yang merupakan suatu bentuk sintesa. Budaya politik merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem politik. Hal ini disebabkan karena struktur dan fungsi politik dalam suatu sistem politik sangat bergantung pada budaya politik yang melingkupinya. Dalam konteks sistem politik di Indonesia, budaya politik mengacu pada berbagai jenis lingkungan yang mempengaruhi dan memberi tekanan pada sistem politik, bahkan yang

dianggap sebagai sistem politik yang paling kuat dan fundamental (Manurung et al., 2024). Budaya politik sangat erat kaitannya pada generasi milenial saat ini, kita dapat melihat generasi milenial saat ini budaya politik mereka berkurang di akibatkan media social yang di salah gunakan, akan tetapi tidak lepas dari itu banyak generasi milenial yang menggunakan media social dengan cara sangat bijak. Milenial secara sederhana didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara tahun 1980an dan akhir 1990an. Generasi ini merupakan bagian atau segmen masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial berbasis internet. Media sosial yang menjadi salah satu ciri teknologi informasi berbasis internet sebenarnya merupakan media yang sangat efektif untuk penyebaran informasi, pengembangan ilmu pengetahuan, forum pertukaran informasi, pengembangan bisnis, dan lain-lain.

Media sosial berbasis internet yang umum digunakan dan diintegrasikan dalam kehidupan generasi ini terutama adalah Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan blog. Media sosial ini dapat diakses dengan mudah dan murah melalui ponsel anda yang mendukung android. Meskipun media-media tersebut dapat dimanfaatkan secara positif oleh generasi milenial untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka di berbagai bidang kehidupan, media-media tersebut dapat memberikan dampak negatif jika konten yang mereka lihat tidak mendidik atau mendidik memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat. Konten media sosial yang saat ini kita dengar juga banyak memuat berita bohong (disinformasi) dan ujaran kebencian. Mengandung unsur negatif seperti pornografi, provokasi, penyebaran ekstremisme, perjudian, bahkan prostitusi. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu, konten media sosial mungkin mengandung unsur kampanye hitam atau kampanye negatif terhadap kandidat tertentu. (Komariah & Kartini, 2019). Hal ini memberikan peluang bagi generasi Milenial untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi berita palsu dan membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Meskipun teori demokrasi partisipatif menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, berita palsu dapat melemahkan partisipasi yang sehat. Mis informasi dapat mempengaruhi opini publik dan pemilu. Ketika masyarakat terpapar misinformasi, mereka dapat mengambil keputusan politik yang tidak berdasarkan fakta, hal ini dapat mengurangi efektivitas demokrasi partisipatif karena keputusan yang diambil tidak mencerminkan kehendak masyarakat. Pemberitaan palsu juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di masyarakat. Informasi palsu dan manipulasi fakta dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi hubungan antar negara. Perdebatan yang konstruktif dan saling menghormati penting dalam demokrasi partisipatif, namun kebohongan dapat mengganggu perdebatan.

Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memberantas misinformasi sangat penting untuk mencapai demokrasi partisipatif yang kuat. Masyarakat di negara ini harus memiliki literasi media yang baik, keterampilan kritis, dan kemampuan memverifikasi informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan membuat keputusan berdasarkan fakta. (Hutajulu et al., 2024) Untuk respon generasi milenial terhadap budaya politik yang di lakukan pemerintah desa ialah, beberapa masyarakat generasi milenial berpendapat bahwa pemerintah sendiri ikut andil terhadap budaya politik, pemerintah desa juga mengingatkan para generasi milenial harus bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media social karena banyak sekali oknum-oknum yang menyalah gunakan media social untuk menjatuhkan salah satu pihak tanpa terlihat benar atau tidaknya, pemerintah juga turut andil agar generasi milenial ikut berpartisipasi pada budaya politik, salah satu contoh berpartisipasi ialah dengan ikut kegiatan KKPS di desa bandar klippa, banyak generasi milenial yang ikut berpartisipasi di KPPS, KPPS salah satu budaya politik yang di lakukan oleh pemerintah desa bandar klippa, pemerintah sendiri tidak membatasi usia anak-anak muda yang terpenting sudah memiliki KTP, pemerintah desa sendiri sangat merangkul anak-anak muda yang ikut berpartisipasi, walaupun anak-anak muda belum mempunyai pengalaman pemerintah setempat tetap merangkul anak-anak muda tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa Bandar Klippa telah mengadopsi berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik generasi milenial pasca Pemilihan Umum 2024. Strategi-strategi tersebut meliputi penyelenggaraan forum diskusi, pelatihan sosialisasi, dan pemanfaatan media sosial. Forum diskusi rutin diadakan untuk membahas isu-isu politik lokal,

sementara pelatihan sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai proses pemilihan dan peran serta hak politik. Media sosial digunakan sebagai alat utama untuk menjangkau dan mengedukasi generasi milenial tentang pentingnya partisipasi politik. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan signifikan, seperti rendahnya pemahaman politik lokal di kalangan generasi milenial dan kurangnya keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan politik. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi politik sejak dini dan dominasi informasi politik nasional dibandingkan dengan isu-isu lokal turut berkontribusi pada hambatan ini. Oleh karena itu, meskipun upaya pemerintah desa sudah signifikan, diperlukan perhatian lebih lanjut dalam edukasi dan keterlibatan generasi milenial untuk menciptakan budaya politik yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Wempie, M., & Akmaluddin, A. (2024). BUDAYA POLITIK PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. *Journal.Unbara.Ac.Id*, 1. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1397%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/download/1397/1055>
- Abunawas, A. (2023). Sosialisasi Dan Edukasi Politik Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 Kepada Masyarakat Desa Rodaya Kalimantan Barat. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 658–663. <https://journal-center.litpam.com/index.php/linov>
- Alfret Goraph, F., & Keradjaan, H. (2010). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP BUDAYA POLITIK PEMILIH DESA ADAT (Studi Kasus Tentang Tipologi Pemilih Desa Kakara Dalam Pemilihan Kepala. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Arif, M. (2021). Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara. *Press*, 1–273. http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/682%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/682/1/GENERASI_MILENIAL_moh_arif.pdf
- Boinauw, I., Ismed, K., & Kadir, M. A. . (2023). Media Sosial Dan Politik Generasi Milenial Kota Sorong Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Maladum*, 1(1), 36–46. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jm/article/view/2354>
- Fauzi, H. (2023). Budaya Politik Pemilih Milenial (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020). *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 89–94. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.98>
- Gaffar, J. M. (2012). Politik Hukum Pemilu. In *Konstitusi Pers*.
- Hutajulu, S., Ginting, S., & Manasyekh, Y. (2024). *Digitalisasi Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial dan Gen Z Di Indonesia*. 2.
- Irwan, L., J, A. R., & Jaya, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 2(2), 78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/18019>
- Kantaprawira, R. (1998). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar / Rusadi Kantaprawira* (Cetakan 5). Sinar Baru.
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu. *Aristo*, 7(2), 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>
- Kusmanto, H. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. 1(1), 39–47.
- Manurung, M., Aurelia, D., Harahap, N. H., & Nst, R. F. (2024). PERAN SOSIAL MEDIA DAN BUDAYA POLITIK GENERASI MILENIAL DALAM PEMILU. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i1.13300>
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi. In *UNP Press Padang*.
- Mohd Zain, Z. (2021). Budaya politik masyarakat Melayu: Satu analisis. *Malaysian Journal of Society and Space*, 17(1), 297–311. <https://doi.org/10.17576/geo-2021-1701-22>
- Muhammad Nuruzzaman, Ali Fauzi, & Ihsan. (2020). "Partisipasi Politik Generasi Milenial: Tantangan dan Peluang dalam Pemilu 2019." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 13(2),

177–195.

- Munadi, M. (2023). Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>
- Patmisari, P., Sumarsih, E. J., Setyadi, Y. B., Prasetyo, W. H., & Muthali'in, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 213. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p213-225>
- Pureklolon, T. T. (2021). EKSISTENSI BUDAYA POLITIK DI INDONESIA : SEBUAH KAJIAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Putri Adeana, F., Rahman, A., Putriana, A., Harahap, H., Nisa, K., Nuryansyah Nugraha, M., Rahmayanti Berutu, S., Anggraini Silalahi, T., Paramita Purba, T., & Syekh Abdul Halim Hasan Ishlahiyah Binjai, S. H. (2022). *PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP GENERASI MILENIAL DI LAUT DENDANG*. 1(1), 1–7.
- Rohim, M., & Wardana, A. (2019). Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 47–63. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.47-63>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Suparno. (2022). *Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa*. <https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1>